



PERUM BULOG

berkerjasama dengan

FATETA IPB

KONDISI PEMBERASAN

DI INDONESIA DAN DUNIA

Dr. Kaman Nainggolan



PROSIDING

Lokakarya Nasional

UPAYA PENINGKATAN

NILAI TAMBAH

PENGOLAHAN PADI

Jakarta, 20-21 Juli 2004

KONDISI PERBERASAN INDONESIA DAN DUNIA¹

Oleh: Dr. Ir. Kaman Nainggolan²

KETERSEDIAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI

Berdasarkan ARAM II BPS, produksi padi tahun 2004 diperkirakan meningkat sekitar 2,93 persen dibandingkan produksi 2003, sehingga produksi akan mencapai 53,67 juta ton gabah atau setara dengan 33,92 juta ton beras. Pertumbuhan produksi saat ini lebih ditentukan oleh adanya peningkatan luas panen sebesar 3,09 persen, sementara itu produktivitasnya menurun sebesar 0,15 persen. Dengan jumlah penduduk sekitar 216 juta jiwa, diperkirakan kebutuhan beras pada tahun 2004 mencapai 33,18 juta ton, yang meliputi konsumsi langsung rumah tangga sebesar 113,5 kg beras/kap/tahun, kebutuhan antara termasuk industri sebesar 27 kg/kapita/tahun, serta kebutuhan lainnya 2,87 juta ton.

Realisasi produksi padi pada musim panen bulan Januari sampai dengan April 2004 mencapai 25,65 juta ton (48 persen). Sementara itu ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menunjukkan bahwa hujan masih akan terus berlangsung, sehingga musim tanam kedua di beberapa daerah sentra produksi padi akan terjadi pada bulan Juli-Agustus 2004. Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan bulan September 2004 kebutuhan beras masyarakat masih akan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

¹ Disampaikan pada Lokakarya Nasional "Upaya Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Padi",

tanggal 20-21 Juli 2004 di Gedung Bulog I, Jakarta.

² Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.

KETERSEDIAAN BERAS DUNIA

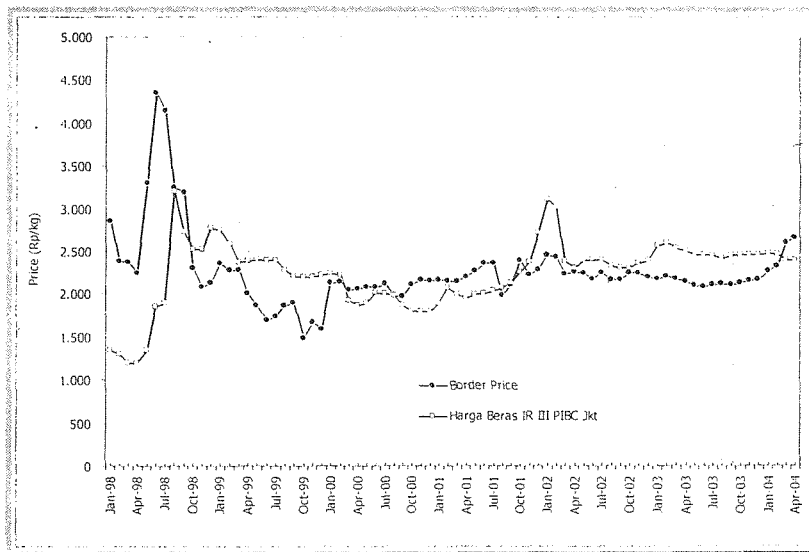
Produksi padi dunia tahun 2004, menurut ramalan FAO, diperkirakan akan meningkat sekitar 3,7 persen sehingga mencapai 613,2 juta ton gabah (setara dengan 409,6 juta ton beras). Peningkatan produksi terutama terjadi di Asia, khususnya dari negara produsen gabah terbesar dunia, yaitu RRC sebesar 6,7 persen dan India sebesar 3,1 persen. Indonesia adalah negara produsen gabah terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan India. Namun demikian Indonesia adalah juga negara pengimpor beras terbesar di dunia.

Kebutuhan beras dunia tahun 2004 diperkirakan akan mencapai sekitar 414 juta ton beras, meningkat 1 persen dibandingkan tahun 2003. Kebutuhan terbesar adalah untuk konsumsi langsung yang berfluktuasi sekitar 368 juta ton. Konsumsi per kapita/tahun dunia diperkirakan menurun dari 58,7 kg pada tahun 2003 menjadi 58,6 kg.

Kebutuhan beras global diantisipasi akan melebihi produksi padi. Stok beras dunia pada akhir tahun 2003 diduga sebesar 103,4 juta ton dan diprediksi akan turun sampai 98,9 juta ton pada akhir tahun 2004. Stok pada bulan April 2004 mencapai 101,7 juta ton, dan pada bulan Mei 2004 meningkat 1,7 juta ton karena adanya peningkatan angka ramalan produksi (ARAM II) Indonesia. Seperti tahun sebelumnya, stok dari negara RRC pada akhir tahun juga akan mengalami penurunan sebesar 12,5 juta ton menjadi 61 juta ton, demikian juga stok di negara eksportir seperti Thailand dan Amerika Serikat juga diperkirakan akan menurun. Disisi lain persediaan beras akan meningkat di India dan Myanmar karena adanya pembatasan ekspor.

KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL

Sejak krisis pada akhir tahun 1998, telah terjadi perubahan drastis dalam politik perberasan nasional. Perubahan yang sangat penting adalah liberalisasi impor beras secara penuh dengan dicabutnya monopoli impor beras oleh Bulog mulai September 1998, sesuai dengan Kepmen Perindag No: 439/MPP/Kep/9/1998. Bea Masuk beras ditentukan sebesar 0 (nol) persen, serta dicabutnya monopoli impor pupuk oleh PT Pusri sejak 2 Desember 1998. Sejak Oktober 1998, harga beras dunia cenderung menurun, sehingga dengan persetujuan IMF pada tanggal 1 Januari 2000, pemerintah menetapkan bea masuk sebesar Rp 430/kg atau setara 30 persen ad-valorem. Sejak saat itu harga internasional yang diukur dengan *border price* cenderung mendekati harga domestik (Gambar 1).



Gambar 1. Harga beras Bangkok Broken 25% dan harga beras IR-III di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

Selanjutnya kebijakan perberasan di Indonesia direformulasi kembali pada tahun 2001-2002. Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, serta sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah telah memberi arahan yang jelas tentang kebijakan perberasan nasional yang komprehensif, sebagaimana tercantum dalam isi Inpres No. 9 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Inpres No. 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan. Kebijakan perberasan nasional tersebut dapat diringkaskan ke dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional.
2. Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.
3. Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh pemerintah.
4. Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen.
5. Memberikan jaminan bagi persediaan dan penyaluran beras dan bahan pangan lain bagi kelompok masyarakat miskin dan atau rawan pangan.

Ada beberapa perubahan paradigma yang mendasar pada penerbitan Inpres tentang Kebijakan Perberasan tersebut dibandingkan dengan berbagai Inpres yang terkait dengan ekonomi beras yang dikeluarkan sebelumnya. Inpres No. 9 Tahun 2002 tersebut mengatur ekonomi perberasan secara komprehensif dalam satu paket, sedangkan dalam Inpres-Inpres tentang perberasan sebelumnya lebih terfokus pada pengaturan harga dasar gabah. Secara lebih rinci perubahan paradigma tersebut adalah :

1. Sistem ekonomi beras nasional dilihat sebagai suatu sistem agribisnis beras sehingga kebijakan harga beras hanyalah merupakan salah satu komponen saja dari paket kebijakan ekonomi beras secara komprehensif.

Kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG, *floor price policy*) diganti dengan Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HPP, *procurement price policy*). Melalui kebijakan ini ditetapkan harga gabah yang dibeli oleh pemerintah pada titik pengadaan (gudang Bulog) dengan kualitas tertentu.

Kebijakan perberasan dikembangkan dengan menganut pendekatan "ekonomi pasar terkelola (*managed market mechanism*), dalam upaya melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Artinya selama pasar dapat berfungsi dengan baik dan efisien, maka pengembangan sistem dan usaha agribisnis perberasan mengacu pada mekanisme pasar, tetapi jika terjadi sebaliknya, maka pemerintah akan melakukan intervensi.

Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah dalam Inpres No. 9/2002 tersebut telah ditindaklanjuti dengan SKB Kepala Badan Bimas ketahanan Pangan dan Bulog yang menetapkan harga dasar pembelian pemerintah untuk GKG, GKS dan GKP di tingkat penggilingan masing-masing sebesar Rp 1.700/kg, Rp 1.500/kg dan Rp 1.230/kg.

Dalam rangka melindungi petani dari membanjirnya beras impor yang masuk ke Indonesia, sejak Januari 2004, pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan impor beras, melalui Kepmen Perindag No. 9/MPP/Kep/1/2004, yang pada dasarnya mengatur:

2. Pelarangan impor beras satu bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan dua bulan sesudah panen raya
3. Pada periode di luar panen raya, beras impor dapat masuk dengan pengaturan: jenis, jumlah, tempat (pelabuhan), kualitas dan waktu.

Dengan pertimbangan bahwa panen kedua tahun ini di beberapa daerah sentra produksi akan terjadi bulan Juli - Agustus, dan bahwa ketentuan impor beras tersebut telah memberikan dampak positif, baik dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam negeri pada tingkat yang wajar, maka pada bulan Mei 2004 telah ditetapkan Kepmen Perindag No. 357/MPP/5/2004 tentang perubahan atas Kepmen Perindag No. 9/MPP/Kep/1/2004. Kepmen baru tersebut mengatur perubahan masa pelarangan impor, yang semula dari tanggal 21 Januari sampai 30 Juni 2004 menjadi dari tanggal 21 Januari sampai dengan 31 Juli 2004. Dengan demikian impor, baru dapat dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan satu bulan sebelum panen raya padi tahun 2005.

Untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, terutama bagi golongan masyarakat yang berpendapatan rendah dan rawan pangan, pemerintah melaksanakan program distribusi beras murah kepada rumah tangga miskin melalui program Raskin. Selama periode 1998 – 2003, melalui program OPK/Raskin, pemerintah telah menyalurkan sekitar 10 juta ton beras, atau rata-rata sekitar 1,7 juta ton beras pertahun, kepada sekitar 7 juta rumah tangga miskin. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, program

Raskin masih menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan pokok yang telah diidentifikasi antara lain adalah:

4. Rendahnya kualitas beras yang didistribusikan.
5. Beragamnya harga yang harus dibayar oleh penerima raskin.
6. Kurangnya timbangan beras yang diterima oleh peserta raskin.
7. Kurang tepatnya sasaran lokasi dan rumah tangga penerima raskin.
8. Timbulnya dampak program Raskin yang menekan harga gabah petani di sentra produksi pada saat panen raya.

Mengingat bahwa perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih, maka program Raskin ini perlu dilanjutkan, namun perlu dikaitkan dengan program pengurangan kemiskinan secara keseluruhan dan pengadaannya dititik beratkan dari produksi dalam negeri. Dengan demikian, program Raskin dapat dikatakan berhasil jika besaran kegiatan itu menurun.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kebijakan perdagangan internasional Indonesia mengacu pada kesepakatan pertanian (AoA) WTO. Marginalisasi ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia terjadi karena *level of playing field* yang jauh berbeda dengan negara maju. Defisit perdagangan negara berkembang semakin lebar, karena perdagangan global dan impor meningkat pesat, sementara negara berkembang tidak mampu berkompetisi. Harga beras internasional saat ini, tidak lagi menggambarkan tingkat efisiensi atau ongkos produksi, karena: (a) negara eksportir beras melakukan perlindungan terhadap petani produsen dalam negeri dengan menerapkan tarif bea masuk beras yang tinggi, seperti China 141,82 persen, Thailand 40 persen,

Philipina 50 persen sedangkan Indonesia hanya Rp 430/kg, setara 30 persen, (b) negara eksportir beras memberikan berbagai bentuk subsidi untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri dan subsidi ekspor, serta (c) pasar beras internasional merupakan pasar residual, dalam arti bahwa beras yang dijual murah tersebut adalah beras yang mempunyai kualitas rendah dan tidak dikonsumsi di dalam negeri.

Pada perundingan WTO akhir-akhir ini, Indonesia bersama negara berkembang lainnya sedang memperjuangkan *Strategic Product* (dimana salah satu komoditinya adalah beras) yang merupakan *Non-Trade Concerns* yang terkait dengan ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan kemiskinan. Komoditas yang termasuk SP diharapkan akan mendapat perlakuan khusus (pengecualian), seperti penurunan tarif dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) dalam pengaturan impor. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa SP didukung oleh lebih dari 33 negara yang tergabung dalam G33. Kelompok ini telah mendeklarasikan *Alliance of the SP/SSM* sebagai *platform* perjuangannya.

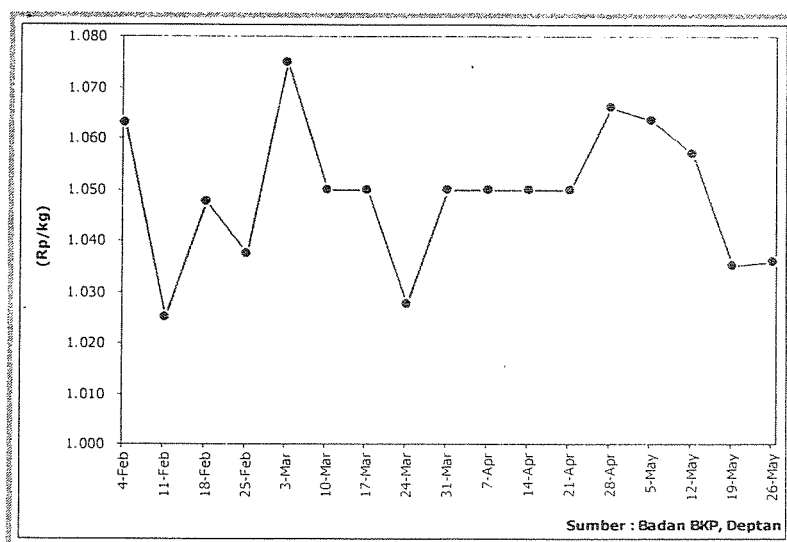
SITUASI PERDAGANGAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI

Perkembangan harga gabah pada tingkat petani pada musim panen raya tahun ini dapat dikatakan relatif rendah dibandingkan tahun yang lalu. Harga gabah pada bulan April 2003 adalah Rp 1.172,5/kg GKP dan petani yang menerima harga gabah di bawah HDPP adalah 61,9 persen, sedangkan harga gabah pada bulan April 2004 adalah Rp 1.157,7/kg GKP dan petani yang menerima harga gabah di bawah HDPP adalah 75,0 persen. Pada bulan Mei 2004, harga gabah mulai membaik dengan peningkatan sebesar 8,9 persen.

Perkembangan harga gabah di tingkat petani tercantum dalam Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Perkembangan harga GKP dan laju perubahan, Januari-April 2003 dan 2004

Bulan	Harga GKP		Laju Perubahan	
	2003	2004	2003	2004
Jan	1.252	1.287		
Feb	1.271	1.202	1,6%	-6,7%
Mar	1.232	1.113	-3,1%	-7,4%
Apr	1.173	1.158	-4,8%	4,0%
Mei	1.217	1.261	3,8%	8,9%
Laju			-2,5%	-1,2%

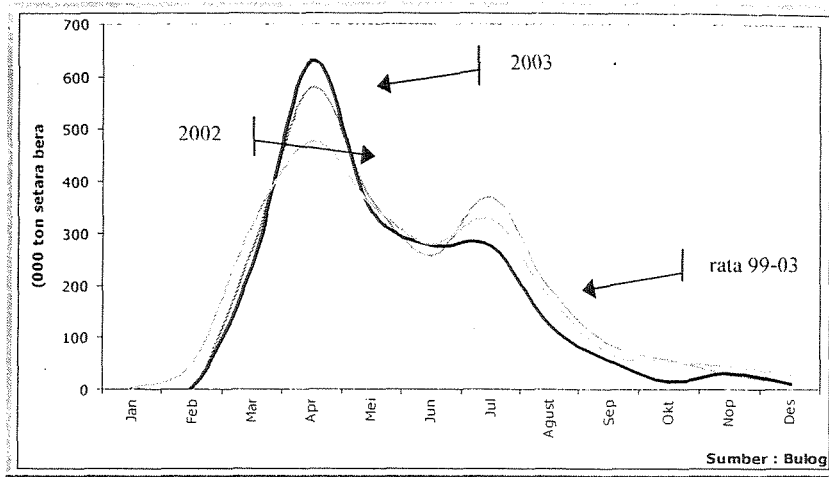


Gambar 2. Median harga GKP hasil pemantauan tahun 2004.

Berdasarkan hasil pemantauan di sentra-sentra produksi padi di Jawa, rendahnya harga gabah pada tahun ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

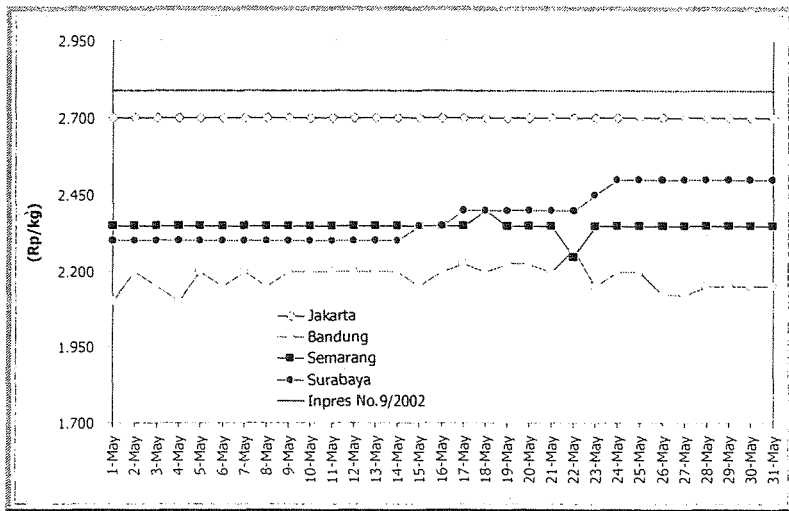
9. Padi di panen secara serempak dengan volume yang relatif lebih besar.
10. Pada saat padi di panen curah hujan masih relatif tinggi, sehingga kadar air gabah pada waktu dijual masih tinggi.
11. Petani tidak melakukan penundaan penjualan gabah untuk mendapatkan harga yang lebih baik, karena kurangnya akses petani terhadap sarana pengolahan pasca panen dan karena masalah permodalan.

Sebagai implementasi dari kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2002 dan dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah petani pada tingkat wajar terutama pada saat panen raya, pemerintah melalui Perum Bulog telah melakukan pembelian gabah di dalam negeri dengan volume sekitar 6 - 7 persen dari total produksi nasional (Gambar 3). Pengadaan gabah dalam negeri oleh Perum Bulog sampai dengan bulan April 2004 sudah mencapai sekitar 1,5 juta ton. Namun demikian, hasil pemantauan di sentra produksi padi menunjukkan bahwa volume pengadaan gabah oleh Perum Bulog tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak mengalami penurunan.

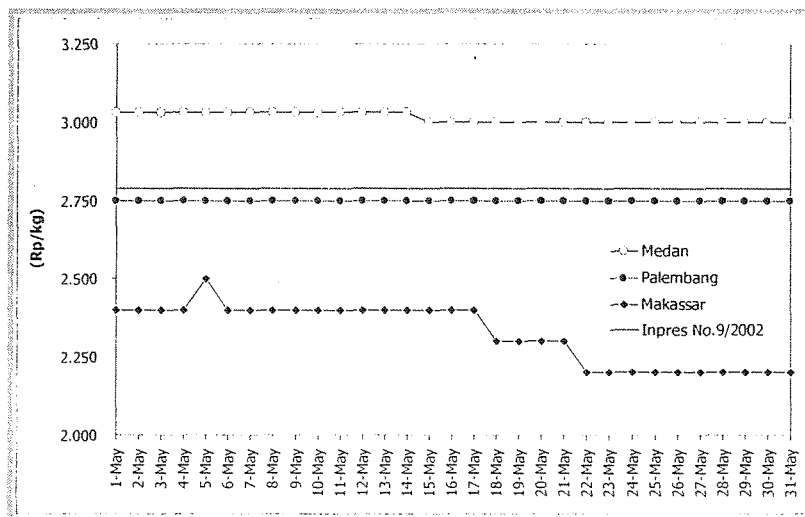


Gambar 3. Realisasi pengadaan gabah dalam negeri oleh Bulog.

Walaupun pemerintah, melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004, telah melarang importasi beras semenjak tanggal 20 Januari 2004 sampai dengan 30 Juni 2004, namun harga beras di dalam negeri dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Bahkan harga beras di beberapa kota besar mengalami penurunan pada saat puncak musim panen raya (Gambar 4a dan 4b). Keadaan ini sekali lagi menunjukkan bahwa pasokan beras dalam negeri sampai dengan akhir bulan Juni mendatang dapat dikatakan aman.



Gambar 4a. Harga beras harian di 7 kota besar, Mei 2004.



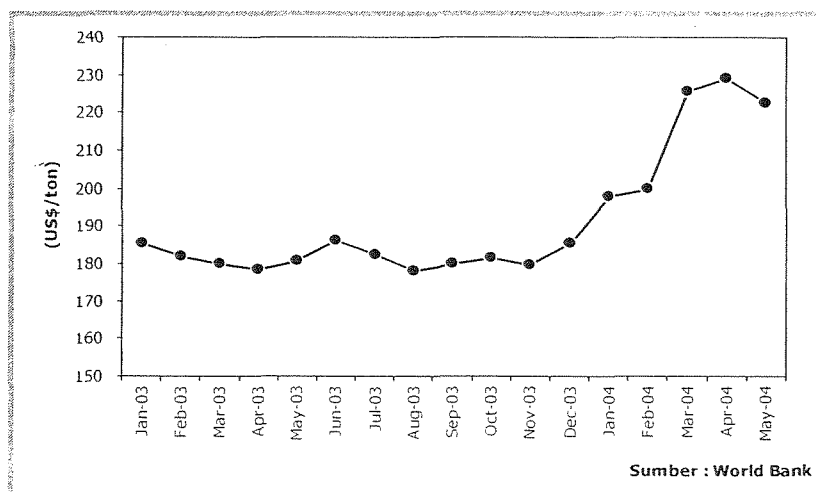
Gambar 4b. Harga beras harian di 7 kota besar, Mei 2004.

SITUASI PERDAGANGAN BERAS INTERNASIONAL

Walaupun pemerintah telah melakukan pelarangan impor beras semenjak tanggal 21 Januari 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 (diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2004), namun

berdasarkan data ekspor beras yang dilaporkan oleh *The Rice Trader*, masih terjadi pengiriman beras dari negara eksportir beras dengan tujuan Indonesia sebanyak kurang lebih 175 ribu ton selama periode Januari – Maret 2004. Walaupun jumlah pengiriman beras ke Indonesia tersebut jauh lebih kecil volumenya dibanding dengan beras yang dikirim ke Indonesia dalam periode Januari – Maret 2003 yang sebesar 993,2 ribu ton, namun keadaan ini menunjukkan bahwa pada saat ini masih ada upaya-upaya untuk melakukan impor beras secara tidak legal.

Harga beras di pasar internasional pada akhir-akhir ini mengalami peningkatan, yaitu dari harga 198 USD per MT (f.o.b. Bangkok, kualitas 25 persen patahan) pada bulan Januari 2004, menjadi sekitar 229,3 USD per MT pada bulan April 2004. Namun demikian, setelah itu laju kenaikan harga beras di pasar internasional mulai menurun, dan saat ini pada tingkat 222,5 USD per MT (Gambar 5).



Gambar 5. Perkembangan harga beras internasional Broken 25% fob Bangkok, Januari 2003 – Mei 2004.

Meningkatnya harga beras di pasar internasional tersebut berkaitan terutama dengan meningkatnya permintaan impor beras oleh RRC, dan berkurangnya pasokan ekspor beras oleh Vietnam, India, Pakistan dan Amerika Serikat. Berkurangnya ekspor di negara-negara eksportir beras tersebut berkaitan dengan menurunnya produksi beras di negara-negara yang bersangkutan.

Meningkatnya harga beras di pasar internasional pada saat ini belum berpengaruh nyata terhadap harga beras di dalam negeri, karena Indonesia tengah mengalami panen raya dan pada saat ini sedang dikenakan pelarangan impor beras. Namun demikian, peningkatan harga beras di pasar internasional tersebut harus tetap diwaspadai, terutama pada saat Indonesia akan membuka impor beras kembali mulai tanggal 1 Agustus 2004 yang akan datang. Jangan sampai dibukanya impor beras tersebut memacu peningkatan harga beras di pasar internasional.

KEMANDIRIAN PANGAN DAN UPAYA PENINGKATANNYA

Walaupun tingkat ketergantungan Indonesia pada impor beras masih relatif rendah (4 – 5%), namun perkembangan impor beras ini perlu diwaspadai, karena laju pertumbuhan kebutuhan beras lebih cepat dibandingkan laju produksinya. Pertumbuhan produksi selama lima tahun terakhir, rata-rata 0,8 persen per tahun, sementara itu laju pertumbuhan impor beras mencapai 2,5 persen per tahun. Rendahnya pertumbuhan produksi beras dalam negeri, antara lain disebabkan terjadinya penurunan rendemen padi sebagai akibat dari:

12. Penerapan teknologi yang tidak sesuai anjuran (termasuk penggunaan benih unggul dan pemupukan berimbang).

Kehilangan hasil karena cara panen (perontokan), penanganan pasca panen (penjemuran, penggilingan serta penyimpanan) yang masih tradisional. Peningkatan harga sarana produksi (pupuk dan pestisida) dan upah tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat intensifikasi usaha tani.

Karena beras merupakan komoditas strategis, ketergantungan pada impor akan memberikan potensi masalah. Secara nasional hal ini tidak dikehendaki karena mencerminkan ketahanan pangan yang terus melemah. Oleh karena itu diperlukan langkah kebijakan yang dapat mendorong kemandirian pangan yang mengandung arti "kebutuhan pangan nasional harus dipenuhi secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, modal sosial dan ekonomi yang dimiliki petani Indonesia, yang pada gilirannya harus berdampak kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi petani dan masyarakat lainnya." Kemandirian dalam hal perberasan dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi disamping juga mendorong menurunnya permintaan akan beras.

Upaya peningkatan produksi dilakukan dengan peningkatan produktivitas lahan, peningkatan intensitas pertanaman (IP) dan perluasan areal tanam, serta penurunan kehilangan hasil panen dan pasca panen. Salah satu terobosan inovasi teknologi yang dapat dibanggakan saat ini untuk meningkatkan produktivitas lahan adalah dihasilkannya varietas unggul tipe baru (VUTB) Fatmawati yang mampu meningkatkan produktivitas padi 10-15 persen dibandingkan varietas IR 64, Cisadane, Ciliwung dan varietas unggul lainnya. Dalam pengembangan VUTB tersebut akan didukung oleh teknologi budidaya yang tepat termasuk kerapatan tanam, pemupukan dalam pola pengelolaan tanam terpadu (PTT). Perluasan areal tanam

dilakukan melalui rehabilitasi lahan sawah potensial, pada tahun 2005 diharapkan akan terjadi perluasan areal tanam seluas 500 ribu hektar yang berasal dari rehabilitasi eks PLG dan kantong-kantong produksi lainnya. Upaya untuk menurunkan kehilangan hasil pada saat panen dan pasca panen, serta peningkatan mutu, antara lain dilakukan melalui gerakan penanganan panen dan pasca panen, pengembangan teknologi alsintan panen dan pasca panen, dukungan permodalan dalam perbaikan sistem panen dan penanganan pasca panen.

Selain berbagai upaya yang bersifat teknis, juga dilakukan upaya non teknis, melalui kebijakan harga, proteksi dan promosi. Untuk menanggulangi menurunnya keuntungan usaha tani padi akibat meningkatnya harga sarana produksi dan upah tenaga kerja, dilakukan melalui pengendalian harga gabah ditingkat petani, seperti kebijakan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP), pemberian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP), dan sistem tunda jual.

Sampai saat ini konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras, dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, pemerintah melakukan upaya untuk menggalakkan program diversifikasi (penganekaragaman) pangan melalui upaya penyediaan pangan yang beragam dari olahan non beras, serta mengembangkan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat agar tetap menyukai makanan khas lokal. Selain bahan pangan pokok yang telah biasa dikonsumsi oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung dan sagu, beberapa pemerintah daerah telah berencana untuk mengembangkan pangan hasil pengolahan tanaman gadung, sukun dan sebagainya.

Kebijakan yang bersifat protektif untuk meningkatkan produksi beras, seperti: kebijakan tarif impor dan pengaturan impor masih diperlukan selama kita menilai bahwa perdagangan internasional beras belum merefleksikan kondisi yang menguntungkan untuk perkembangan perberasana nasional. Sampai saat ini kebijakan yang bersifat protektif dirasakan masih diperlukan untuk melindungi petani dari dampak negatif harga beras internasional yang murah dan memberikan insentif untuk merangsang peningkatan produktivitas usahatani. Sementara itu, kebijakan promosi seperti: meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif agribisnis perberasan, melalui peningkatan produktivitas dan penurunan biaya produksi. Walaupun produksi beras dalam negeri masih relatif rendah dari kebutuhan, saat ini telah terdapat beberapa sentra produksi yang mempunyai kelebihan stok dan mempunyai kesulitan untuk menjualnya dengan tingkat harga yang baik. Untuk waktu mendatang daerah-daerah yang telah mempunyai kelebihan stok diharapkan dapat melakukan ekspor. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pengembangan industri beras nasional harus dilandasi oleh keunggulan komparatif dan kompetitif yang tercermin dari meningkatnya produktivitas, efisiensi biaya produksi, pengurangan kehilangan hasil dan peningkatan kualitas.

Lampiran 1. Perkembangan harga beras Thailand, dan perhitungan border price (Januari 1998-April 2004)

Bulan & Tahun	Harga Bangkok ¹⁾ (US\$/TON)	Freight (US\$/TON)	Harga C&F ²⁾ (US\$/TON)	Kurs (Rp.US\$)	Harga C&F (Rp/kg)	Border Price ³⁾ (Rp/kg)	Harga Beras IR III ⁴⁾ PIBC Jkt (Rp/kg)
Jan-98	250,00	15,00	265,00	10.250	2.716	2.852	1.350
Feb-98	243,00	15,00	258,00	8.800	2.270	2.384	1.300
Mar-98	246,00	15,00	261,00	8.660	2.260	2.373	1.200
Apr-98	253,00	15,00	268,00	7.970	2.136	2.243	1.200
May-98	265,00	15,00	280,00	11.250	3.150	3.308	1.350
Jun-98	266,00	15,00	281,00	14.750	4.145	4.352	1.850
Jul-98	270,00	15,00	285,00	13.850	3.947	4.145	1.900
Aug-98	265,00	15,00	280,00	11.050	3.094	3.249	3.200
Sep-98	265,00	15,00	280,00	10.850	3.038	3.190	2.725
Oct-98	275,00	15,00	290,00	7.550	2.190	2.299	2.525
Nov-98	257,00	15,00	272,00	7.300	1.986	2.085	2.527
Dec-98	255,00	15,00	270,00	7.516	2.029	2.131	2.772
Jan-99	250,00	15,00	265,00	8.493	2.251	2.363	2.751
Feb-99	233,00	15,00	248,00	8.751	2.170	2.279	2.594
Mar-99	228,00	15,00	243,00	8.944	2.173	2.282	2.373
Apr-99	205,67	15,00	220,67	8.651	1.909	2.004	2.385
May-99	207,00	15,00	222,00	8.002	1.776	1.865	2.408
Jun-99	224,00	15,00	239,00	6.726	1.608	1.688	2.397
Jul-99	226,00	15,00	241,00	6.875	1.657	1.740	2.397
Aug-99	220,25	15,00	235,25	7.565	1.780	1.869	2.283
Sep-99	201,00	15,00	216,00	8.386	1.811	1.902	2.214
Oct-99	190,25	15,00	205,25	6.900	1.416	1.487	2.200
Nov-99	199,20	15,00	214,20	7.425	1.590	1.670	2.200
Dec-99	199,00	15,00	214,00	7.100	1.519	1.595	2.225
Jan-00	203,00	15,00	218,00	7.425	1.619	2.130	2.250
Feb-00	202,00	15,00	217,00	7.505	1.629	2.140	2.229
Mar-00	188,00	15,00	203,00	7.590	1.541	2.048	1.929
Apr-00	181,00	15,00	196,00	7.945	1.557	2.065	1.864
May-00	168,00	15,00	183,00	8.620	1.577	2.086	1.906
Jun-00	166,00	15,00	181,00	8.735	1.581	2.090	2.010
Jul-00	164,00	15,00	179,00	9.003	1.612	2.122	2.000
Aug-00	163,00	15,00	178,00	8.290	1.476	1.979	1.977
Sep-00	152,00	15,00	167,00	8.780	1.466	1.970	1.863
Oct-00	155,00	15,00	170,00	9.395	1.597	2.107	1.800

Bulan & Tahun	Harga Bangkok ¹⁾ (US\$/TON)	Freight (US\$/TON)	Harga C&F ²⁾ (US\$/TON)	Kurs (Rp.US\$)	Harga C&F (Rp/kg)	Border Price ³⁾ (Rp/kg)	Harga Beras IR III ⁴⁾ PIBC Jkt (Rp/kg)
Nov-00	159,00	15,00	174,00	9.530	1.658	2.171	1.800
Dec-00	156,00	15,00	171,00	9.595	1.641	2.153	1.800
Jan-01	159,00	15,00	174,00	9.482	1.650	2.162	1.889
Feb-01	156,00	15,00	171,00	9.631	1.647	2.159	2.069
Mar-01	145,00	15,00	160,00	10.206	1.633	2.145	1.993
Apr-01	137,00	15,00	152,00	11.075	1.683	2.198	1.950
May-01	140,00	15,00	155,00	11.315	1.754	2.272	1.997
Jun-01	148,00	15,00	163,00	11.284	1.839	2.361	2.000
Jul-01	154,00	15,00	169,00	10.904	1.843	2.365	2.038
Aug-01	150,00	15,00	165,00	8.957	1.478	1.982	2.075
Sep-01	158,00	15,00	173,00	9.266	1.603	2.113	2.131
Oct-01	155,00	15,00	170,00	11.018	1.873	2.397	2.262
Nov-01	151,00	15,00	166,00	10.269	1.705	2.220	2.374
Dec-01	156,00	15,00	171,00	10.300	1.761	2.279	2.715
Jan-02	162,00	15,00	177,00	10.865	1.923	2.449	3.112
Feb-02	171,00	15,00	186,00	10.237	1.904	2.429	3.014
Mar-02	168,00	15,00	183,00	9.419	1.724	2.240	2.383
Apr-02	169,00	15,00	184,00	9.486	1.745	2.263	2.300
May-02	175,00	15,00	190,00	9.115	1.732	2.248	2.396
Jun-02	176,00	15,00	191,00	8.689	1.660	2.173	2.408
Jul-02	178,00	15,00	193,00	8.963	1.730	2.246	2.396
Aug-02	170,00	15,00	185,00	8.928	1.652	2.164	2.327
Sep-02	170,00	15,00	185,00	8.954	1.656	2.169	2.300
Oct-02	174,00	15,00	189,00	9.152	1.730	2.246	2.300
Dec-02	174,00	15,00	189,00	8.907	1.683	2.198	2.400
Jan-03	176,75	15,00	191,75	8.689	1.666	2.179	2.565
Feb-03	176,00	15,00	191,00	8.895	1.699	2.214	2.600
Mar-03	171,25	15,00	186,25	8.930	1.663	2.176	2.540
Apr-03	170,25	15,00	185,25	8.811	1.632	2.144	2.498
May-03	173,00	15,00	188,00	8.434	1.586	2.095	2.450
Jun-03	176,33	15,00	191,33	8.229	1.574	2.083	2.450
Jul-03	176,40	15,00	191,40	8.336	1.596	2.105	2.450
Aug-03	174,25	15,00	189,25	8.503	1.609	2.120	2.425
Sep-03	174,33	15,00	189,33	8.462	1.602	2.112	2.450
Oct-03	177,40	15,00	192,40	8.440	1.624	2.135	2.450
Nov-03	178,00	15,00	193,00	8.495	1.640	2.152	2.450
Dec-03	179,50	15,00	194,50	8.489	1.651	2.164	2.450

Bulan & Tahun	Harga Bangkok ¹⁾ (US\$/TON)	Freight (US\$/TON)	Harga C&F ²⁾ (US\$/TON)	Kurs (Rp.US\$)	Harga C&F (Rp/kg)	Border Price ³⁾ (Rp/kg)	Harga Beras IR III ⁴⁾ PIBC Jkt (Rp/kg)
Jan-04	193,75	15,00	208,75	8.395	1.752	2.270	2.480
Feb-04	199,50	15,00	214,50	8.425	1.807	2.328	2.460
Mar-04	227,20	15,00	242,20	8.569	2.075	2.609	2.400
Apr-04	232,25	15,00	247,25	8.604	2.127	2.664	2.400

Harga FOB Bangkok 25 % broken.

Harga FOB ditambah Freight.

Harga C&F dikonversi ke rupiah ditambah 5% sebagai biaya bongkar muat, angkut, dll.

Harga grosir di Pasar Induk Cipinang

Lampiran 2. Average bound and applied tariff of food crop products

Komoditi	Tarif	USA	EU	Japan	Aus	India	Ina	Chi	Mal	Tha
Beras	Bound	3.13 c/Kg	7.1	na	1	0	160	180	0	52
	Applied	1.57 c/Kg		351 T/Kg	1	0	30	141.82	0	40
	Difference	1.56 c/Kg			0	0	130	39	0	8
Jagung	Bound	0.98 c/Kg	9.4 Euc/T	na	1	na	40	180	5	30
	Applied	0.10		50	1	65	0	58.20	0	20
	Difference	0.88 c/Kg			0		40	22	5	10
Kedelai	Bound	4.4 c/Kg	0	na	1	100	27	180	10	40
	Applied	0	0	0	0	75	0	141.82	0	25
	Difference		0		1	25	27	39	10	15

Source of Data : WTO Schedules Concessions dan Website APEC

- Note: 1) Negara AS, EU, dan Jepang menggunakan tarif spesifik untuk kebanyakan komoditi pertaniannya
 2) Australia merupakan negara yang paling liberal dalam penggunaan tarif
 3) Diantara negara berkembang, Indonesia merupakan negara yang menerapkan tarif yang jauh di bawah bound tariffnya
 4) India dan China menerapkan tarif yang cukup tinggi (mendekati bound tariff)

